

KELAS DAN KETIMPANGAN STRUKTURAL MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA AMBON

Class and Structural Inequality of fishing communities in Ambon City

Gadri Ramadhan Attamimi^{1*)}, Rilus A. Kinseng², Ivanovich Augusta²

¹Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

²Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

^{*)}E-mail: gadriattamimi@gmail.com

ABSTRACT

Social class is a social phenomenon that often occurs in every social group including the fishing communities. The structural inequality of fishing communities is characterized by the imbalance in ownership of production equipment and income distribution among fishermen. This research was conducted in one of the Fishermen Village (Negeri) in Ambon City, called Negeri Latuhalat. Type of research used in this study is post-positivism paradigm using qualitative approach supported by quantitative research. The purpose of this research is to analyze the level of imbalance between Ambon City fishermen. The results showed the formation of fishermen social classes which consist of masnait fishermen, tanase fisherman laborer, small fishermen, middle fishermen and tenant fisherman (capitalist). The gini index of fishermen in the research location shows a figure of 0.74, meaning that it shows a high imbalance between fisherman classes. The ratio of kuznets or the average comparison between fishermen received by 33% of the top group of Rp. 8,404,567, - and 25% of the lowest group of Rp. 2.040.000, -. Measurements using the World Bank also show the same thing with the results of gini index measurements that illustrate the portrait of inequality income distribution in the study sites. This condition illustrates that there has been an imbalance between fishermen classes, as much as 75% are only able to receive 8.72% of total income while as much as 25% of tenant fishermen (capitalist) enjoy and control 91.73% of total income.

Keyword: Social Class, Inequality, Fisherman, Gini Ratio

ABSTRAK

Kelas sosial yang terbentuk pada masyarakat nelayan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi pada setiap kelompok sosial, salah satunya adalah masyarakat nelayan. Ketimpangan struktural pada masyarakat nelayan ditandai dengan kepemilikan alat produksi dan distribusi pendapatan antar kelas sosial nelayan yang tidak berimbang. Penelitian ini diambil pada salah satu Desa (Negeri) Nelayan yang ada di Kota Ambon yaitu Negeri Latuhalat. Jenis penelitian yang di gunakan ialah paradigma post-positivisme dengan pendekatan penelitian kualitatif serta di dukung penelitian kuantitatif. Tujuan dari Penelitian ini adalah menganalisis tingkat ketimpangan antar nelayan Kota Ambon. Hasil Penelitian menunjukkan terbentuknya kelas sosial nelayan yang terdiri dari buruh nelayan masnait, buruh nelayan tanase, nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan pemilik (kapitalis). Indeks gini nelayan pada lokasi penelitian menunjukkan angka sebesar 0,74, artinya menunjukkan ketimpangan yang tinggi antar kelas nelayan. Rasio kuznets atau perbandingan rata-rata antara nelayan yang diterima oleh 33% kelompok teratas sebesar Rp. 8.404.567,- dan 25% kelompok terbawah sebesar Rp. 2.040.000,-. Pengukuran dengan menggunakan Bank Dunia juga menunjukkan hal yang sama dengan hasil pengukuran indeks gini yang menggambarkan potret ketidakmerataan distribusi pendapatan di lokasi studi. Sekitar 42% nelayan yang berada di lokasi studi menunjukkan presentase pendapatan yang diterima oleh kelas nelayan kecil maupun buruh masnait lebih kecil dari 12%. Kondisi ini menggambarkan bahwa telah terjadi ketimpangan antar kelas nelayan, sebanyak 75% hanya mampu menerima 8,72% dari total pendapatan sedangkan sebanyak 25% nelayan pemilik (kapitalis) menikmati dan menguasai 91,73% dari total pendapatan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ketimpangan, Nelayan, Gini Rasio

PENDAHULUAN

Ketimpangan merupakan masalah yang kurang mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, padahal kesenjangan sosial-ekonomi akan mempengaruhi ketimpangan antar penduduk di Indonesia (Haughton dan Khandker 2013). Menurutnya, ketimpangan ialah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Informasi sejarah menunjukkan bahwa ketimpangan telah berlangsung sejak lama dan bersifat struktural, terutama sebagai konsekuensi dari kolonialisme sejak abad ketujuhbelas (Agusta, 2014). Isu ketimpangan merupakan aspek penting dalam penanggulangan kemiskinan, kemiskinan umumnya ditandai ketimpangan-ketimpangan antara lain, kepemilikan sumberdaya, kesempatan dalam berusaha, skill, dan faktor lainnya yang menyebabkan perolehan pendapatan yang tidak seimbang dan mengakibatkan struktur sosial yang timpang (Dahuri dan Nugroho 2012). Menurut Kinseng (2017),

salah satu proses terbentuknya kelas ialah struktur sosial yang terbentuk sebagai akibat dari struktur sosial yang lain, sebagai contoh stratifikasi sosial, termasuk kelas sosial, terbentuk karena adanya struktur sosial berupa sistem kepemilikan (*property right*), menurutnya seperti yang dijelaskan oleh Karl Marx, sistem kepemilikan pribadi (*private property right*) menyebabkan adanya kelas pemilik dan kelas buruh, sistem kepemilikan pribadi juga menyebabkan adanya stratifikasi sosial di kalangan petani dan nelayan. Selanjutnya menurut Kohn (1990), dasar pembentukan kelas sosial yakni pertama kelas berdasarkan kepemilikan (*ownership*) alat produksi, kedua kelas yang berdasarkan kontrol (terhadap alat produksi), dan ketiga kelas berdasarkan kontrol terhadap manusia. Salah satu kelompok masyarakat yang berada pada masalah ketimpangan adalah nelayan, nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut (Imron, 2003). Kinseng (2014) menjelaskan berbagai pihak

mengasosiasikan nelayan dengan kemiskinan atau marginalitas. Menurutnya, nelayan sebagai kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari kelompok sosial tidak terlepas dengan kelas sosial. Kelas sosial yang terbentuk pada nelayan disebut sebagai struktur empat kelas, keempat kelas tersebut adalah *pertama* buruh nelayan, *kedua* nelayan kecil (mempekerjakan 0-3 orang buruh), *ketiga* nelayan menengah (mempekerjakan 4-10 orang buruh), dan *keempat* nelayan besar atau kapitalis (mempekerjakan lebih dari 10 orang buruh) (Kinseng, 2014).

Kota Ambon yang terletak di Pulau Ambon dan dikelilingi oleh laut, merupakan penghasil produk perikanan terbesar kedua di Provinsi Maluku setelah Kabupaten Maluku Tengah. Nelayan di Kota Ambon memiliki jenis dan alat tangkap yang berbeda-beda yaitu pukat pantai, pukat cincin, jaring insang, jaring angkat, huhate, pancing tonda, jala, bubu dan serok (BPS Kota Ambon, 2017). Kota Ambon yang sebagian besar adalah perairan pesisir dan laut, bila ditinjau dari besaran stok maupun peluang pemanfaatan dan pengembangan sektor perikanan, mempunyai potensi yang strategis, mengingat kondisi geografis Kota Ambon sebagai kota di pulau kecil yang dikelilingi dengan teluk dan pesisir pantai serta aktivitas perikanan di Kota Ambon didominasi oleh perikanan tangkap (DKP Kota Ambon, 2017). Aktivitas sektor ini memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Ambon. Potensi sumberdaya perikanan yang ada di Kota Ambon terdiri dari kelompok jenis ikan yaitu ikan pelagis, ikan demersal dan ikan karang. Sumbangan sektor perikanan Kota Ambon Tahun 2016 dari kelompok ikan, total potensi adalah 124.213,4 ton/tahun, dengan potensi lestari adalah 58.907,2 ton/tahun. Kelimpahan stock ikan pelagis di Kota Ambon adalah 2.091,30 ton/bulan, Pemanfaatan ikan pelagis mencapai 377,01 ton/bulan, kelimpahan stock ikan demersal di Kota Ambon adalah 240,2 ton/bulan, Pemanfaatan ikan demersal mencapai 40,60 ton/bulan (DKP Kota Ambon, 2017).

Potensi sumberdaya perikanan yang masih kaya ini membuka peluang bagi banyak pihak dalam kelas sosial nelayan untuk memanfaatkan hasil perikanan. Pada titik tertentu ada kelas sosial nelayan yang justru membuka peluang bagi mereka untuk memanfaatkannya secara lebih tanpa memikirkan kelas sosial nelayan yang lain dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut. Kusnadi (2002) mengemukakan bahwa dalam memanfaatkan hasil perikanan yaitu dilihat dari kelas sosial nelayan, dimana kelas sosial nelayan dalam kegiatan di sektor perikanan tangkap melibatkan banyak pihak, khususnya (1) pemilik perahu dan peralatan tangkap, (2) awak perahu atau nelayan buruh, dan (3) penyedia modal informal, yang biasanya sebagai pedagang (perantara) ikan selain itu. Pentingnya untuk meneliti terkait ketimpangan struktural nelayan di Kota Ambon karena tiga kategori sosial ini memainkan peran utama dalam kegiatan sosial ekonomi nelayan, oleh karena itu potensi dan peluang berbagai pihak dalam memainkan perannya pada kelas sosial nelayan tersebut menjadi kajian penting bagi peneliti untuk mengemukakan tentang **bagaimana tingkat ketimpangan struktural nelayan di Kota Ambon** serta tujuan dari penelitian ini **untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan nelayan di Kota Ambon**.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2017. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan tersebut melibatkan pencampuran (*mixing*) kedua pendekatan dalam satu penelitian (Creswell 2013). Studi kasus digunakan

sebagai metode kualitatif dan survey digunakan untuk metode kuantitatif. Penelitian mengambil dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan responden dipilih dengan metode *stratified-accidental sampling* yaitu mengambil siapa saja nelayan yang bisa ditemui untuk diwawancara dari setiap kelas sosial (Kinseng, 2013). Jumlah populasi nelayan berdasarkan kelas sosial diperoleh melalui data sekunder pada pemerintah Negeri Latuhalat sebanyak 120 responden yang tersebar pada Negeri Latuhalat. Distribusi responden terdiri dari 30 responden dengan status sebagai nelayan kecil sesuai klasifikasi alat tangkap yaitu nelayan jaring puri 10 responden, nelayan jaring 15 responden dan nelayan pancing tangan 5 responden. Buruh Nelayan terdiri dari 30 responden yang terdiri dari 20 buruh masnait dan 10 buruh tanase. Nelayan menengah sebanyak 30 responden dengan alat tangkap pancing tonda. Nelayan besar (pemilik kapal) purse seine sebanyak 30 responden. Seperti disajikan pada table 1 terkait status responden di Negeri Latuhalat.

Tabel 1. Jumlah Responden berdasarkan Status

No	Status Responden	(%)	Jumlah
1	Nelayan Kecil	25	30
2	Buruh Nelayan	25	30
3	Nelayan Menengah	25	30
4	Nelayan Besar	25	30
Total		100	120

Sumber : Data Primer Diolah 2017

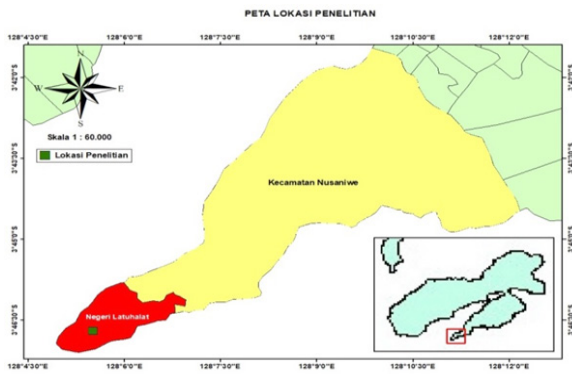
Adapun untuk analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mereduksi data-data yang telah didapatkan terlebih dahulu untuk memilah data mana yang sesuai. Sementara untuk analisis data kuantitatif diolah dengan menggunakan *Microsoft Excel* agar mempermudah dalam pengolahan data. Selanjutnya data dianalisis dengan melakukan interpretatif secara deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi sosial nelayan di Negeri Latuhalat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Ambon secara geografis terletak pada sebagian besar wilayah di Pulau Ambon. Kota Ambon terletak pada posisi 3^o-4^o Lintang Selatan dan 128^o-129^o Bujur Timur. Sesuai Perda Kota Ambon nomor 2 tahun 2006, Kota Ambon memiliki lima kecamatan, dua puluh empat Negeri Adat, lima Desa Administratif, dan dua puluh Kelurahan. Kecamatan-Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan Kecamatan Leitimur Selatan. Seluruh kecamatan memiliki daerah yang berbasis perikanan ini dikarenakan kondisi geografis Kota Ambon adalah Pulau dan Teluk, namun yang menjadi fokus penelitian adalah pada Kecamatan Nusaniwe Negeri Latuhalat (BPS Kota Ambon 2017).

Kecamatan Nusaniwe terletak pada sebagian Pulau Ambon dimana pada bagian utara berbatasan dengan Teluk Ambon, bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Banda, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Leitimur Selatan, dan sebelah Barat berbatasan langsung juga dengan laut Banda. Luas wilayah Kecamatan Nusaniwe adalah sebesar 88,35 Km², yang terbagi atas 8 (delapan) Kelurahan dan 5 (lima) Negeri definitif salah satunya adalah Negeri Latuhalat (BPS Kota Ambon 2017).



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

Negeri Latuhalat merupakan bagian dari Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, luas wilayah Negeri Latuhalat sebesar 13,00 Km². Secara geografis Negeri Latuhalat berbatasan dengan sebelah utara Teluk Ambon, sebelah Selatan Laut Banda, sebelah Timur Laut Banda, dan Sebelah Barat Negeri Nusaniwe. Berdasarkan data monografi Tahun 2015 Negeri Latuhalat secara topografi membentang dari pegunungan sampai ke pesisir pantai. Pola pemukiman penduduk menyebar dari dataran tinggi sampai ke pesisir pantai sedangkan pusat pemerintahan berada pada pesisir pantai. Iklim di Negeri Latuhalat dipengaruhi oleh Laut Banda sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan cuaca yang mengakibatkan musim penghujan di bulan Juni-September sedangkan musim kemarau di bulan Oktober-Februari dan bulan Maret-Mei adalah musim pancaroba.

Jumlah penduduk berdasarkan monografi Negeri Latuhalat sebanyak 8.620 jiwa atau 1.949 KK yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.226 jiwa dan perempuan sebanyak 4.394 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif adalah 5.826 orang, jumlah penduduk yang belum sekolah sebanyak 1.127 orang, dan jumlah penduduk yang masih sekolah sebanyak 2.004 jiwa (Pemerintah Negeri Latuhalat 2016).

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No.	Kategori	Jumlah Penduduk	%
1.	Laki-laki	4.226	49,03
2.	Perempuan	4.394	50,97
Total		8.620	100,00

Sumber : Data Monografi Negeri Latuhalat tahun 2016

Jumlah penduduk usia 6 -12 tahun dan 13 -19 tahun tergolong tinggi di Negeri Laruhalat dibanding kelompok umur lainnya. Pada bagian lain, jumlah dan proporsi penduduk kelompok umur Balita (0-5 tahun) di Negeri Latuhalat relatif berimbang dengan jumlah dan proporsi penduduk kategori usia lanjut (> 60 tahun). Melalui pengelompokan penduduk pada Tabel ternyata jumlah penduduk usia produktif dalam hal bekerja (20 – 55 tahun) di Negeri Latuhalat tergolong tinggi, yaitu mencapai 46,65%. Fakta ini memberi suatu indikasi bahwa peluang pengembangan penduduk usia produktif cukup besar untuk menghasilkan produk-produk potensial berbasis sumberdaya yang dimiliki.

Mata pencaharian penduduk Negeri Latuhalat adalah mayoritas sebagai Nelayan. Jumlah dan proporsi penduduk Negeri Latuhalat yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 57%. Pada bagian lain, jumlah dan proporsi penduduk dengan mata pencaharian sebagai peternak, tukang dan pedagang sangat kecil. Negeri Latuhalat juga memiliki penduduk yang berprofesi sebagai aparaturnegara, yaitu ASN dan TNI/POLRI

yang mencapai 17 % (Pemerintah Negeri Latuhalat 2016).

Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	%
1.	0 – 5	692	8.03
2.	6 – 12	944	10.95
3.	13 – 19	933	10.82
4.	20 – 25	670	7.77
5.	26 – 30	692	8.03
6.	31 – 35	680	7.89
7.	36 – 40	687	7.97
8.	41 – 45	685	7.95
9.	46 – 50	695	8.06
10.	51 – 55	672	7.80
11.	56 – 60	650	7.54
12.	> 60	620	7.19
Total		8.620	100.00

Sumber : Data Monografi Negeri Latuhalat tahun 2016

Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah Penduduk (Orang)	Proporsi (%)
1.	Nelayan	1465	56.00
2.	Petani	454	19.00
3.	ASN	441	17.00
4.	TNI/POLRI	54	2.00
5.	Wiraswasta (pedagang)	24	0.94
6.	Pensiunan	96	3.75
7.	Pertukangan	12	0.47
8.	Peternak	12	0.47
Total		1284	100.00

Sumber : Data Monografi Negeri Latuhalat 2016

Pembentukan Kelas Nelayan

Pada masyarakat kapitalisme analisis Marx menemukan dua kelas utama yaitu borjuis dan proletariat. Borjuis adalah nama yang diberikan Marx untuk kaum kapitalis di dalam ekonomi modern. Kaum borjuis memiliki alat-alat produksi dan memperkerjakan tenaga kerja upahan (Ritzer, 2012). Gambaran proses pembentukan kelas pada usaha nelayan Negeri Latuhalat dapat dilihat dari jenis alat tangkap (Kepemilikan alat produksi) yang digunakannya serta pendapatan yang dia peroleh, karena masyarakat Negeri Latuhalat telah lama memanfaatkan sumberdaya laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perkembangan kelas nelayan dari tahun 1970-an sampai sekarang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tahun 2010 menandakan terbentuknya formasi kelas nelayan pada nelayan yang ada di Negeri Latuhalat, sekarang nelayan yang mendominasi adalah buruh nelayan serta pemilik kapal dengan jenis alat tangkap *purse seine*, selain itu beberapa nelayan kecil yang masih ada di Negeri Latuhalat menggunakan alat tangkap jaring puri, jaring, dan pancing tangan. sedangkan untuk nelayan menengah sering menggunakan pancing tonda. Untuk nelayan kecil karena hasil tangkapan mengalami penurunan mereka sering beralih mata pencaharian menjadi tukang bangunan, tukang batu, atau buruh nelayan tidak tetap

(non-masnait) pada beberapa kapal *purse seine*. Alat tangkap *purse seine* mengalami peningkatan dari tahun 1997 sampai 2010. Hal ini disebabkan nelayan dengan alat tangkap mini *purse seine* mengganti alat tangkapnya dengan alat tangkap yang lebih berteknologi serta ukuran kapal yang besar dan jumlah buruh yang lebih banyak.

Tabel 5. Periode pembentukan kelas nelayan di Negeri Latuhalat

1970-1980	1980-1990	1990-1997
Belum terbentuk kelas nelayan. Alat tangkap nelayan masih bersifat tradisional, terdiri dari alat tangkap pancing tangan, bubu, bom, dan jaring puri	Pelarangan penggunaan bom ikan sehingga alat tangkap nelayan yang paling banyak digunakan adalah pancing tangan dan jaring puri	Awal proses pembentukan kelas dengan masuknya alat tangkap dengan pancing tonda, secara teknologi dan efektifitas kerja lebih mudah dan menghasilkan ikan ukuran besar
1997-2010	2010-Sekarang	
Terbentuknya kelas nelayan besar dengan kebijakan departemen eksplorasi laut melalui pemberian bantuan mini <i>purse seine</i> namun terkendala dengan kerusuhan Ambon tahun 1999. Tahun 2004 dilanjutkan kembali.	Struktur kelas terbentuk dengan lebih dimantapkan dengan kapal <i>purse seine</i> yang mampu memperkerjakan 10-15 Buruh Nelayan.	

Sumber : Data Primer Diolah 2017

Secara umum proses pembentukan kelas diatas, mempengaruhi peningkatan jumlah unit alat tangkap dan nelayan yang menyebabkan hasil tangkapan mengalami penurunan. Penurunan jumlah tangkapan juga diakibatkan oleh tekanan pemanfaatan oleh pemilik kapal yang mengharuskan buruh nelayan tanase menggunakan rumpon di beberapa area tangkap agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil atau jenis ikan yang sangat menguntungkan nelayan adalah jenis ikan momar, ikan komo (tongkol), ikan kawalnya dan ikan cakalang hal ini karena permintaan pasar. Nelayan besar (pemilik kapal) bagi mereka tidak mengenal musim paceklik, kalau sudah melaut *masanait* harus pulang dengan ikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara pada beberapa buruh *masnait* kapal *purse seine*:

“Bagi bos kapal, mereka tidak mengenal musim tangkap dan paceklik, pokoknya kalau kita sudah pergi menangkap, pulang harus dapat hasil, kalau musim kurang ikan, harga ikan akan lebih tinggi dibanding musim panen, walaupun ikan sedikit kita bisa memperoleh uang seperti harga ikan ketika di musim ikan”

Kelas Nelayan

Kategori kelas menurut Kinseng (2014) yang mengkombinasikan

kategori kelas dari Wright dan kategori sosial usaha penangkapan dan struktur kelas nelayan dari Clement dan kemudian dibandingkan dengan kondisi rill pada nelayan di Balikpapan yaitu dengan mengelompokkan nelayan dengan apa yang disebut Kinseng sebagai “Struktur Empat Kelas”. Struktur empat kelas nelayan di Balikpapan agak berbeda dengan struktur empat kelas nelayan yang ada di Kota Ambon. Pada lokasi studi di Negeri Latuhalat. struktur empat kelas nelayan antara lain adalah nelayan kecil, buruh nelayan yang terdiri dari buruh masnait dan buruh tanase, nelayan menengah (bekerja sendiri atau dibantu 1 orang), dan nelayan besar (kapitalis) atau pemilik kapal (memperkerjakan 10-15 orang)

Nelayan Kecil

Nelayan kecil pada lokasi penelitian di Negeri Latuhalat merupakan nelayan yang memiliki alat produksi tangkap yang seadanya yaitu perahu berbahan kayu, mesin ketinting berkapasitas 5Pk dan bekerja secara individu. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kinseng (2014), nelayan kecil di Balikpapan menggunakan sekitar dua orang buruh. Modal melaut yang dimiliki oleh nelayan kecil yaitu hanya berkisar diantara 5-10 juta rupiah, berbeda dengan nelayan di Balikpapan yang membutuhkan modal mencapai Rp. 25.000.000,-. Nelayan kecil pada lokasi terbagi tiga yakni nelayan pancing tangan, nelayan jaring puri, dan nelayan jaring. Nelayan kecil sangat bergantung dengan kondisi musim, musim ikan terjadi di bulan Mei-Oktober sedangkan musim kurang ikan terjadi pada bulan November-April. Kendala yang sering dihadapi nelayan kecil adalah bantuan atau kredit usaha nelayan, ini dikarenakan alat produksi yang dimiliki mereka tidak masuk dalam kriteria barang jaminan. Pendapatan yang fluktuatif membuat nelayan kecil seringkali melakukan hutang atau pinjaman, mereka sering terkendala pada pinjaman (bon) di kios-kios maupun pembayaran kredit motor yang harus dibayar secara angsur setiap bulan. Motor bagi mereka sangat penting karena menjadi kendaraan yang cukup mampu untuk membantu kelangsungan usaha nelayan kecil, hal ini dikarenakan pelarangan pembelian BBM di SPBU dengan memakai jerigen sehingga nelayan seringkali menampungnya di tangki motor kemudian dipakai pada mesin tangkap mereka. Kebijakan penggunaan bahan bakar pertalite dan kelangkaan untuk mendapatkan BBM premium serta penghapusan subsidi juga sangat meresahkan mereka kaum nelayan kecil, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nelayan kecil Pak Natan Mahulette di lokasi penelitian mengatakan bahwa:

“BBM dengan jenis pertalite sangat tidak menguntungkan kita nelayan kecil harganya sudah mahal belum lagi jenis ini tidak cocok dengan mesin ketinting yang kita punya. Mesin saya ini sejak pakai pertalite sering macet tidak sama dengan pakai jenis premium selalu lancar. Bisa juga buat saya tidak bisa melaut karena buat mesin cepat panas dan harus di istirahatkan, bisa jadi cepat rusak. Kalau rusak siapa yang mau ganti, kan kasihan kita ini warga kecil”

Kenaikan harga BBM, kelangkaan jenis BBM premium, kebijakan pemakaian pertalite, dan sulitnya akses pembelian BBM di SPBU menambah kisah kela nelayan kecil dalam memutus rantai kemiskinan mereka, apalagi 40-50 persen biaya operasional dalam melakukan aktifitas penangkapan adalah penggunaan BBM. Senada dengan yang disampaikan Retna (2018), nelayan kecil di Karangsong sudah terbiasa menggunakan jenis alat tangkap tertentu, sehingga akan sulit untuk menggunakan jenis alat tangkap lain. Selain karena

kebiasaan dan keterampilan dalam menggunakan alat tangkap, juga karena biaya yang harus dikeluarkan lagi ketika mengganti alat tangkap. Nelayan cukup jeli mempertimbangkan maupun mengambil resiko yang akan diterima atas pilihannya.

Nelayan Menengah

Nelayan Menengah di Negeri Latuhalat adalah nelayan dengan alat tangkap pancing tonda, dengan perahu (bodi) berbahan *fiber*, berarmada motor tempel bermerek yamaha yang berkekuatan lebih tinggi 40pk. Modal usaha yang dibutuhkan pada nelayan menengah berkisar 35-40 juta. Nelayan menengah merupakan nelayan kapitalis kecil, di lokasi penelitian. Nelayan menengah bekerja sendiri atau dibantu satu orang. Nelayan pancing tonda pada lokasi penelitian sebanyak 107 kepala rumah tangga yang menggunakan alat tangkap ini. Dimensi kapal pancing tonda yaitu panjang kapal 12m dan tinggi kapal 1m, kapal pancing tonda sering disebut masyarakat sekitar sebagai bodi. Jumlah buruh nelayan pada nelayan menengah pancing tonda ini tidak ada, tenaga perbantuan yang digunakan biasanya adalah anak dari nelayan tersebut atau adik dan kakak yang saling membantu dalam mengoperasikan bodi

Kondisi nelayan menengah terbilang berada pada kondisi sejahtera, menurut mereka, mereka puas menjadi nelayan pancing tonda dikarenakan hasil melaut yang baik. Bagi mereka tidak mengenal musim, musim timur maupun musim barat mereka pergi saja melaut, walaupun terkadang hanya mendapatkan satu ekor ikan tuna bagi mereka itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. satu ekor tuna bisa dihargai Rp.800.000,- –Rp.1.000.000,-. Ikan kemudian akan dijual di *coldstorage* perusahaan perikanan yang ada di Kota Ambon. Satu ekor ikan tuna beratnya bisa mencapai 45 kilogram (kg), menurut mereka harga ikan tergantung dengan kurs dolar terhadap rupiah, kalau lagi bagus-bagusnya satu ekor bisa mendapatkan lebih dari Rp. 1.000.000,- kalo tidak baik bisa hanya Rp. 800.000,-.

Buruh Nelayan dan Nelayan Besar (Kapitalis)

Buruh nelayan atau yang disebut sebagai anak buah kapal (ABK) di lokasi penelitian ditemukan buruh nelayan pada satu kapal terdiri dari 10-15 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala PPI Seri, jumlah buruh nelayan dengan alat tangkap *purse seine* yang ada pada lokasi penelitian sebanyak 555 orang dengan total armada kapal *purse seine* yang beroperasi sebanyak 47 unit. PPI (pelabuhan pendaratan ikan) merupakan pelabuhan untuk nelayan *purse seine* menambatkan perahunya jika musim perairan tenang pada wilayah Teluk Ambon Luar. Kepemilikan dari 47 unit kapal *purse seine* keseluruhannya dimiliki oleh orang asli Negeri Latuhalat dan pekerja buruh nelayan juga berasal dari Negeri Latuhalat.

Buruh nelayan di Negeri Latuhalat terbagi atas dua tingkatan yaitu buruh *masnait* dan buruh *tanase*, *masnait* adalah buruh pekerja sedangkan *tanase* adalah pemimpin daripada *masnait*, Jika dalam satu kapal terdiri dari 15 orang maka 14 orang adalah buruh *masnait* dan satu orang adalah buruh *tanase*. Buruh *tanase* adalah pemimpin dalam kapal sekaligus merupakan kepala *matarumah* yang memimpin keempat belas buruh *masnait*, yang merupakan anggota *matarumah*. Sistem bagi hasil antara kedua buruh nelayan ini akan dibedakan oleh pemilik kapal yaitu melalui pembagian hasil ikan pinggir (ikan makan) yang dilebihkan kepada buruh *tanase* maupun diberikan uang tambahan ketika pembagian upah tahunan. Buruh *tanase* biasanya dilebihkan sebesar Rp. 100.000,-. Kelas buruh nelayan di lokasi penelitian semuanya hanya berada pada satu jenis alat

tangkap saja yaitu nelayan *purse seine* sehingga relasi antara pemilik kapal dan buruh nelayan *purse seine* sangat kuat. *Matarumah* yang merupakan simbol dari tatanan organisasi sosial Negeri sering dipaksakan untuk menekan kelas buruh nelayan, serupa dengan apa yang dikatakan oleh Collins (1975), menurutnya, kelas-kelas sosial atas mampu mengembangkan simbol yang sangat diartikulasikan dan sistem-sistem ideologis, sistem yang sering dapat dipaksakan mereka kepada kelas-kelas sosial yang lebih rendah. Kelas-kelas sosial yang lebih rendah mempunyai sistem-sistem simbol yang kurang berkembang, banyak dari sistem simbol itu mungkin telah dipaksakan kepada mereka oleh kelas-kelas yang berkuasa.

Buruh Nelayan di Negeri Latuhalat tidak dibayar dalam bentuk upah atau gaji harian, namun mereka menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang disepakati sesuai dengan kesepakatan antara *tanase* dan pemilik kapal yaitu dengan sistem bagi hasil 60:40, maka hasil yang didapat akan dibagi ketika akhir tahun menjelang perayaan natal. Mekanisme 60:40 ini dengan kesepakatan biaya perbaikan jaring dan kapal akan ditanggung oleh pemilik kapal. biaya operasional juga ditanggung oleh pemilik kapal. Sistem bagi hasil ini sesuai dengan hasil tangkap, maksimal hasil tangkap per trip bisa mencapai 20-25 *loyang* (wadah baskom) satu *loyang* bisa dihargai sekitar Rp. 750.000,-. Sistem hasil tangkap dalam bentuk *loyang* ini dikenal dengan istilah ikan tengah, ikan tengah merupakan ikan yang di hitung bersama dan harus dijual, sedangkan ada juga ikan pinggir (ikan makan) yaitu sisa ikan yang tidak dihitung bersama antara *tanase* dan *masnait* untuk dijual kemudian dibagi berasama, terkadang ikan pinggir ini dijual kembali oleh istri *masnait* dan *tanase* jika hasil tangkapan lebih. Jika hasil tangkapan kurang maka ikan pinggir ini dibawah pulang untuk kebutuhan makan sehari-hari keluarga. Hal ini membuktikan bahwa kepentingan antara pemilik kapal, buruh *tanase* dan *masnait* tidak terlepaspisahkan sejalan dengan apa yang disampaikan Sumarti (2007), bahwa tindakan atas dasar kepentingan merupakan suatu kekuatan jika dikombinasikan dengan kepentingan orang lain.

Nelayan besar di Negeri Latuhalat merupakan nelayan yang memiliki alat produksi perikanan tangkap yang sudah modern, nelayan pemilik kapal merupakan nelayan yang memiliki kepemilikan alat tangkap berupa *purse seine* (jaring bobo) dan memiliki kapal (*bodi*) dan bermesin tempel 24pk terdiri dari 2-4 unit dalam satu kapal. Nelayan besar memiliki akses pada pemerintah negeri maupun stakeholder terkait sehingga nelayan besar yang paling banyak mendapatkan akses modal dan bantuan motorisasi alat tangkap. Modal usaha yang dibutuhkan berkisar diantara Rp. 400.000.000,-. Selain mampu mengakumulasi alat produksi, mereka juga mampu mengakumulasi kepemilikan kekayaan diluar alat tangkap dari hasil pembagian 60% yang didapatkan. Seperti pada salah satu pemilik kapal Pak Anes, sudah dianggap sebagai orang terkaya di Negeri Latuhalat, memiliki 5 buah kapal *purse seine* dimana memperkerjakan setiap kapal 10-15 orang artinya dia memiliki buruh tenaga kerja nelayan sebanyak 60 orang.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengannya, beliau mengaku bahwa dari hasil usahanya dia dapat mengkuliahkan anaknya ke luar daerah, setiap anaknya diberikan mobil, yang bersangkutan juga memiliki dua mobil pickup dan satu mobil truk yang gunanya untuk membawa hasil tangkapan ke pasar. Sebagaimana penuturan hasil wawancara dengannya adalah sebagai berikut:

“Saya ini hidup sudah tenang, semua anak saya kuliah, saya mempunyai kapal ada 5 buah, satu anak yang tua gagal kuliah kemudian saya

perintahkan dia buat tangani 1 kapal purse seine, semua anak saya, saya belikan mobil, anak saya ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan, anak perempuan saya kuliah di Kota Makassar, istri saya, saya tugaskan mengurus mobil pickup dan truk yang biasanya di sewakan untuk mengangkut hasil tangkapan atau kegunaan lainnya”

“kalau ribut-ribu soal pembagian loyang ikan ini sudah biasa terjadi, makanya setiap ember beberapa dari kita tukang lelang menamai ember ikan supaya menghindari perdebatan sesama tukang lelang”.

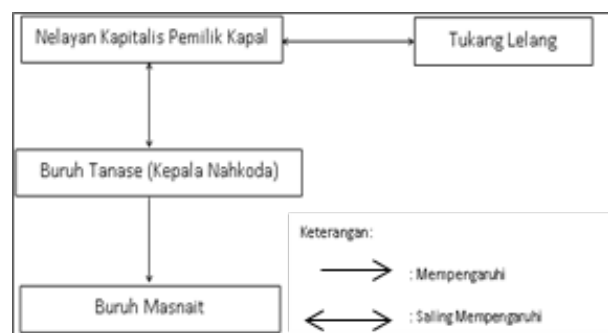
Nelayan besar akan memerintahkan buruh *tanase* dalam segala kebijakannya, biasanya nelayan besar juga memiliki kesepakatan yang dibangun dengan buruh *tanase* selaku pemimpin *masnait*, kesepakatan itu biasa selain ikan pinggir yang diberikan lebih, mereka juga akan mengelabui buruh *masnait* pada hasil ikan tengah jika nelayan mendapatkan hasil lebih 22 loyang maka dua loyang akan disembunyikan oleh *tanase* sehingga pada laporan hasil tangkap hanya mendapatkan hasil 20 loyang. dua loyang yang diambil akan dibagi antara pemilik kapal dan juga *tanase* biasanya satu berbanding satu. Untuk biaya transportasi muatan ikan biasanya dipotong langsung oleh pemilik kapal sebesar Rp.500.000,- sekali angkut. Biaya ini akan diambil oleh pemilik kapal karena mobil pickup yang digunakan adalah miliknya.

Tukang Lelang

Kelas sosial tukang lelang bukan merupakan bagian dalam kelompok sosial nelayan, namun dia memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan yang disebut Kusnadi (2003) sebagai pranata penangkapan dan pranata pemasaran ikan. Pada kasus di lokasi penelitian tukang lelang memiliki pengaruh yang kuat terhadap pranata pemasaran ikan. Berbeda dengan penelitian Kinseng (2014) terkait kelas sosial yang sangat penting dalam masyarakat perikanan yakni kelas pemodal (*merchant class*) yang menempatkan *punggawa* atau *pongawa* dan penyambang sebagai kelas pemodal yang memiliki kapal cukup besar untuk memuat ikan 8 hingga 10 ton. Lain halnya dengan kelas pemodal, tukang lelang di Kota Ambon walaupun tidak memiliki kapal, mereka memiliki kontrol pada pemasaran ikan di pasar utama yaitu Pasar Arumbai, tidak hanya ikan dari nelayan Negeri Latuhalat yang dikontrolnya, namun ikan dari seluruh negeri yang masuk di Kota Ambon harus memperoleh izin dari tukang lelang. Mereka pemegang kuasa dan kontrol terhadap harga ikan di pasar. Fluktuatif harga ikan tergantung dari kesepakatan mereka. Tukang lelang yang ada di Pasar Arumbai berbeda dalam mekanisme kerja dengan tukang lelang yang ada di TPI (tempat pelelangan ikan) yang ditemukan di Jawa atau daerah lainnya.

Tukang lelang di TPI memiliki pembagian kerja (tugas dan fungsi masing-masing) serta aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti adanya pengawas teknik lelang, kepala urusan teknik lelang, kepala sub teknik lelang, juru tawar, juru timbang, juru bakul, dan juru karcis. Tukang lelang di Pasar Arumbai meniadakan tugas dan fungsi tersebut, mereka berkelompok, satu kelompok tukang lelang terdiri dari 5 orang dipimpin oleh kepala tukang lelang. Tukang lelang memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan pemilik kapal, alur dari pemasaran ikan ini pada awalnya akan diangkut dengan mobil pickup milik pemilik kapal ke pasar kemudian di pasar tersebut ikan yang ada di atas mobil diambil oleh tukang lelang kemudian dijual kepada pedagang ikan (papalele) pasar yang sudah menjadi langganannya. Dari hasil pengamatan di Pasar Arumbai biasanya pemilik kapal memiliki kenalan 3-5 kelompok tukang lelang. Hal ini dapat memberi dampak negatif, dikarenakan dalam satu pasar akan terjadi perebutan *loyang* ikan yang ada di atas mobil oleh tukang lelang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tukang lelang di Pasar Arumbai menurut mereka:

Hasil yang diperoleh dari tukang lelang adalah 10 % dari pendapatan kotor hasil jual ikan, hasil ini akan diberikan pemilik kapal setiap bulan jika dalam satu bulan hasil tangkapan sebanyak 22.500 kilogram (kg) dan harga jual Rp.8.500,- per kilogram (kg) maka hasil penjualan ikan adalah Rp. 191.250.000,- maka yang didapat per kelompok tukang lelang adalah sebesar 10 persen dari penjualan tersebut yaitu Rp.19.250.000,-. Kemudian dibagi untuk 5 orang yaitu Rp. 3.850.000,-. Selain itu untuk beberapa kepala tukang lelang, mereka juga memiliki rumpon sebagai pendapatan lainnya, keuntungan yang didapatkan dari kepemilikan mereka terhadap rumpon yaitu melalui mekanisme bagi tiga dari hasil penerimaan.



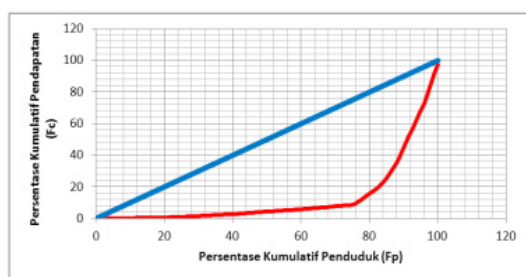
Gambar 2. Relasi Nelayan Kapitalis dan Tukang Lelang

Terdapat dua bentuk hubungan sosial, yaitu hubungan sosial horizontal dan hubungan sosial vertikal (Helmi dan Satria 2012). Hubungan sosial horizontal terjadi apabila individu sama-sama memiliki status sosial ekonomi yang sepadan, sementara hubungan sosial vertikal sebaliknya. Biasanya hubungan sosial vertikal dapat ditemui pada hubungan patron-klien. Pada Gambar 2. Menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin mesra antara nelayan kapitalis pemilik dan tukang lelang secara horizontal saling mempengaruhi untuk melakukan mekanisme dalam pranata pemasaran ikan. Sedangkan dalam pranata penangkapan status hubungan secara vertikal menunjukkan tidak sepadan antara buruh *tanase* dan buruh *masnait* yang menunjukkan garis mempengaruhi, buruh *masnait* jarang sekali bertemu dengan bos kapal begitupun sebaliknya bos kapal seringkali lupa dengan nama anak buahnya buruh *masnait*. hal ini dikarenakan dengan hubungan vertikal yang harus melalui buruh *tanase* (*nahkoda kapal*). hubungan tersebut juga menunjukkan bagaimana buruh *masnait* di eksploitasi melalui mekanisme struktural sehingga mereka selalu dibatasi dalam melakukan hubungan sosial dengan struktur yang ada diatasnya yaitu Buruh *tanase* dan pemilik kapal.

Ketimpangan Pendapatan Nelayan

Ketimpangan pendapatan antar kelas nelayan dapat diukur melalui perbandingan kelompok pendapatan nelayan. Istilah kesenjangan identik dengan kemiskinan relatif, salah satu ukuran dari kesenjangan yaitu dengan menggunakan ukuran gini rasio dan kesenjangan menurut pengukuran bank dunia. Gini koefisien adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna), nilai koefisien gini dibagi

menjadi tiga kategori yaitu nilai koefisien gini (<) 0,4 dikatakan sebagai ketimpangan rendah, 0,4-0,5 ketimpangan sedang, dan (>) 0,5 ketimpangan tinggi (Todaro dan Smith 2004).



Gambar 3. Kurva Distribusi Pendapatan (Kurva Lorenz)

Penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan bersih untuk masing-masing kelas nelayan yaitu nelayan kecil sebesar Rp. 2.040.000,- per bulan dengan presentase sebesar 25%, buruh nelayan masnait rata-rata pendapatan Rp. 6.018.269 dengan presentase 17%, rata-rata pendapatan buruh tanase sama dengan rata-rata pendapatan nelayan menengah sebesar Rp. 8.404.567,- per bulan dengan presentase 33% selanjutnya untuk nelayan besar (pemilik) rata-rata pendapatan sebesar Rp. 182.554.166,- per bulan dengan presentase 25%. Selanjutnya Table 3 menunjukkan bahwa rasio Kuznets atau perbandingan antara rata-rata pendapatan nelayan yang diterima oleh 33% kelompok teratas sebesar Rp. 8.404.567,- dan 25% kelompok terbawah sebesar Rp. 2.040.000,-. Pendapatan 33% kelompok nelayan teratas justru berasal dari buruh nelayan tanase yang tidak memiliki perahu motor dan alat tangkap, yang hanya memanfaatkan tenaganya untuk bekerja. Sedangkan untuk kelompok terbawah merupakan nelayan kecil yang rata-rata pendapatan per-bulan di bawah UMR yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- per bulan (BPS Kota Ambon 2017).

Tabel 6. Presentase Nelayan berdasarkan Kelompok Pendapatan

Kelompok Pendapatan (Rp)	Responden	Presentase	Rata-rata (Rp)
1.200.000-3.800.000	30	25%	2.040.000
3.800.000-6.400.000	20	17%	6.018.269
6.400.000-9.000.000	40	33%	8.404.567
>9.000.000	30	25%	182.554.167

Sumber : Data Primer Diolah 2017

Ketimpangan antar kelas semakin jelas diperlihatkan dengan perbandingan pendapatan rata-rata per bulan. Indeks gini nelayan pada lokasi penelitian menunjukkan angka sebesar 0,74, artinya menunjukkan ketimpangan yang tinggi antar kelas nelayan. Pengukuran dengan menggunakan Bank Dunia juga menunjukkan hal yang sama dengan hasil pengukuran indeks gini yang menggambarkan potret ketidakmerataan distribusi pendapatan di lokasi studi. Lebih dari 40% nelayan yang berada di lokasi studi menunjukkan presentase pendapatan yang diterima oleh kelas nelayan kecil maupun buruh masnait lebih kecil dari 12%. Kondisi ini menggambarkan bahwa telah terjadi ketimpangan antar kelas nelayan, dimana sebanyak 75% hanya mampu menerima 8,27% dari total pendapatan sedangkan sebanyak 25% nelayan pemilik (kapitalis) menikmati dan

menguasai 91,73% dari total pendapatan, seperti pada Tabel 6.

Tabel 7. Ketimpangan Pendapatan Menurut Kriteria World Bank

Kelompok pendapatan	Persentase (%)		Ketimpangan
	Nelayan	Pendapatan	
1.200.000-3.800.000	25	1,03	Tinggi
3.800.000-6.400.000	17	3,02	Tinggi
6.400.000-9.000.000	33	4,22	Tinggi
>9.000.000	25	91,73	Rendah
Total	100,00	100,00	

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Angka ketimpangan dan ukuran Bank Dunia di atas, berbeda dengan angka ketimpangan pada studi sebelumnya yang dilakukan oleh Kinseng (2013) di Indramayu antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh, dimana angka ketimpangan menunjukkan sangat timpang yakni 0,878 serta ukuran Bank Dunia, dimana sebanyak 89,32% nelayan hanya mampu menerima 2,62% dari total pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Rohayati (2017) pada nelayan kecil dan nelayan cantrang di Kota Tegal, juga menunjukkan angka ketimpangan yang tinggi yakni 0,62.

Hasil pengukuran ketimpangan pendapatan di lokasi studi di atas dengan demikian menunjukkan baik dengan kurva lorenz maupun pengukuran world bank, secara jelas bahwa telah terjadi ketimpangan pendapatan yang mempengaruhi kesenjangan sosial antaran kelas nelayan.

Analisis Ketimpangan Sosial Masyarakat Nelayan di Kota Ambon

Studi yang dilakukan pada masyarakat nelayan di Kota Ambon, Negeri Latuhalat, terkait terbentuknya kelas nelayan seperti yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa formasi kelas nelayan pada lokasi studi yaitu buruh nelayan yang kemudian terbagi lagi menjadi kelas buruh masnait dan tanase, nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan pemilik memperlihatkan bagaimana distribusi nelayan yang terjadi sehingga struktur sosial terbentuk dan memicu terjadinya ketimpangan sosial. Distribusi kelas sosial nelayan secara tidak langsung akan membatasi nelayan dalam membangun asosiasi sosial seperti apa yang dikemukakan Turner (1998), menurutnya penjelasan Blau tentang struktur sosial merujuk pada distribusi anggota populasi ke dalam sejumlah posisi yang pada gilirannya membatasi peluang dan kesempatan bagi orang-orang tersebut untuk membangun asosiasi sosial. Selanjutnya baginya Blau menjelaskan konsep kunci untuk memahami struktur sosial melalui parameter, yakni karakteristik yang digunakan oleh anggota populasi untuk membuat perbedaan diantara mereka. Turner (1998) menjelaskan kembali bahwa ada dua jenis parameter, yaitu parameter nominal (*nominal parameters*) dan parameter berjenjang atau bertingkat (*graduated parameters*). Parameter nominal membedakan anggota populasi dengan menggunakan "kategori diskret" (*discrete categories*), seperti suku, agama, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Sementara itu, parameter bertingkat menempatkan anggota populasi ke dalam skala atau tingkatan yang bersifat kontinum, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kekayaan, kekuasaan, status, prestise, dan sebagainya (Turner 1998).

Parameter nominal dengan menggunakan kategori diskret seperti

suku pada lokasi studi terjadi seperti kasus yang dijelaskan bahwa buruh nelayan di Negeri Latuhalat terikat oleh ikatan *mata rumah* (marga) yang mengakibatkan buruh nelayan baik pada ranah laut maupun ranah darat berjumpa dengan saudara se-marga mereka saja sehingga hal ini membatasi asosiasi sosial mereka. Pada parameter bertingkat atau berjenjang juga sama, memperlihatkan pada tingkat pendapatan, status dan kekuasaan yang berbeda. Dari segi pendapatan misalnya nelayan kecil dan nelayan menengah adalah nelayan pemilik pada kelasnya, namun dari segi pendapatan mereka berada dibawah pendapatan buruh nelayan terutama buruh tanase. Buruh tanase yang memiliki pendapatan yang tinggi ini dipengaruhi oleh tingkat status dan kekuasaan yang turut serta dalam mempengaruhi ketimpangan sosial. Buru Tanase sebagai kepala mata rumah yang merangkap juga sebagai nahkoda kapal sehingga hubungan langsung dengan nelayan pemilik kapal besar dan juga mengkoordinir buruh nelayan masnait selaku anak buah kapal.

Ketimpangan sosial yang terjadi pada pendapatan nelayan kecil yang memiliki jurang ketimpangan yang tinggi dengan nelayan pemilik kapal juga dipengaruhi oleh penguasaan alat produksi perikanan tangkap yang berbeda dan sumberdaya perikanan yang berbeda senada dengan Maipita (2014), yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkat penguasaan sumberdaya.

Dampak Negatif Ketimpangan Sosial

Studi tentang ketimpangan sosial pada masyarakat nelayan di Negeri Latuhalat Kota Ambon menunjukkan bagaimana kondisi kemiskinan yang ditandai dengan ketimpangan terjadi pada kelas sosial nelayan sangat krusial. Dimana orang kaya dalam hal ini kelas nelayan besar (kapitalis) mampu mengakumulasi kekayaan yang diperoleh dari ketidakadilan sistem bagi hasil. Ketidakadilan dalam sistem bagi hasil tersebut didapatkan bukan saja dari penerimaan hasil tangkap saja, namun bagi hasil dari rumpon, perbedaan margin hitungan harga bbm antara buruh dan nelayan pemilik, beban perbaikan jaring, serta bunga tabungan buruh nelayan juga di hisap sehingga mereka mampu menikmati dan menguasai pendapatan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi atau ketimpangan pendapatan merupakan persoalan krusial yang dihadapi dan tidak mudah untuk diatasi (Kusnadi 2002). Dampak negatif kemiskinan inilah yang sering kita sebut sebagai kemiskinan struktural. Menurut Sudarso (2007), kemiskinan struktural biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik. Pada lokasi studi ditemukan bahwa beberapa buruh masnait mengaku sistem bagi hasil yang ada bagi mereka tidak adil namun ketidakberdayaan mereka untuk mengeluh kepada buruh tanase mengenai kondisi mereka sangat mereka takuti, mereka menganggap keluhan mengenai kondisi sama saja tidak menghargai pekerjaan yang sudah diberikan oleh kepala mata rumah atau orang tua adat. Sikap hormat inilah yang membuat buruh masnait tidak mau memicu ketegangan dengan pemilik kapal besar.

Senada dengan studi di lapangan seperti yang disampaikan Sukmawati (2008), perbedaan status sosial tidak menimbulkan jarak sosial antar lapisan, karena acuan kehidupan bermasyarakat yang dianut adalah didasarkan pada norma-norma dan nilai-nilai yang merupakan prioritas utama cara mereka bertindak

dan bermasyarakat dalam lingkungannya. Menurutny, namun demikian karena kesenjangan sosial yang sangat jauh berbeda kadang menyebabkan interaksi sosial jarang terjadi antara mereka. Pada lokasi studi menunjukkan karena jurang ketimpangan yang jauh mengakibatkan juga jurang interaksi sosial antara buruh masnait dan nelayan besar. Selain ketakutan untuk menyampaikan keluhan akan kondisi ketidakadilan yang terjadi pada kelas buruh nelayan mereka sebenarnya sering membicarakan kelicikan bagi hasil yang dilakukan oleh buruh tanase dan nelayan besar pemilik kapal ketika dilakukan proses wawancara. Nelayan masnait tidak memiliki daya untuk melakukan protes kepada nelayan pemilik kapal besar. Kondisi mereka yang tidak berdaya inilah karena adanya tekanan struktural. Selain itu buruh nelayan di lokasi studi juga sering mengeluh antar sesama. Keluhan tersebut terkait bagi hasil yang tidak adil, namun hal ini hanya terjadi antar sesama mereka saja mereka tidak mampu menyampaikan keluhan tersebut kepada buruh tanase (nahkoda kapal). Kondisi ini yang menjadi awal mula pemicu ketegangan dalam diri para buruh nelayan. Pola patron-klien seperti ini memang sering terjadi pada masyarakat nelayan senada dengan itu Satria (2009), mengemukakan pola patron-klien terus terjadi dalam komunitas nelayan karena memang belum ada institusi formal yang mampu berperan sebagaimana patron. Selanjutnya Satria (2009), menjelaskan nelayan sendiri belum mampu membangun institusi baru secara mandiri walaupun mereka memiliki solidaritas sesama yang kuat namun kemampuan khusus dalam mengorganisasi diri baik untuk kepentingan ekonomi maupun profesi menjadi lemah di karenakan status Buruh Nelayan sebagai jalan hidup sehingga etika subsistensi masih menjadi pegangan mereka.

Faktor Penghambat Terbentuknya “*class for itself*” dan Konflik Kelas

Dalam studinya pada nelayan di Balikpapan, Kinseng (2011) mengemukakan beberapa faktor yang menghambat formasi kelas atau terbentuknya *class for itself* di kalangan buruh nelayan antara lain adalah fragmentasi, permiabilitas kelas, ketergantungan pada majikan dan ketiadaan pemimpin. Kondisi pada lokasi studi menunjukkan bahwa permiabilitas kelas dan fragmentasi. Fragmentasi kelas yakni merasa senasib dan sepenanggungan antar nelayan pada kelas yang sama pada lokasi studi berdasarkan pengakuan nelayan kecil mereka merasa senasib dengan nelayan-nelayan kecil lainnya dengan kondisi yang serba pas dan hidup dalam keadaan subsisten. Permiabilitas kelas ditunjukkan pada kondisi buruh nelayan di lokasi studi yang menunjukkan keadaan senasib dan sepenanggungan antara buruh masnait dan buruh tanase hal ini dilatarbelakangi dengan mereka adalah sesama buruh yang terikat oleh ikatan kekeluargaan dan bekerja bersama-sama pada satu kapal, walaupun pada dasarnya dari segi bagi hasil mereka tidak berada pada kondisi yang sama. Kondisi seperti diatas yang merasa senasib dan sepenanggungan nelayan kecil maupun buruh nelayan tentunya menghambat dan meniadakan konflik kelas antar nelayan di Negeri Latuhalat. Salah satu karakteristik kelas yang sangat penting adalah kesadaran kelas (*class consciousness*). Kesadaran kelas merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam teori kelas. Seperti dikatakan oleh Wright (1991), selain struktur kelas, analisis kelas juga mencakup unsur lainnya, yakni formasi kelas, perjuangan kelas dan kesadaran kelas. Wright (1987) menjelaskan bahwa kesadaran kelas ini merupakan aspek subyektivitas individu yang kongkret. Menurut Stavenhagen (1975), kesadaran kelas yang menjadi faktor penentu untuk mentransformasikan atau mengubah “*class in itself*” menjadi *class for itself* akan terhambat. Tentunya faktor seperti ketidakadilan dan ketidakberdayaan yang disampaikan oleh buruh nelayan dan

nelayan kecil seperti diuraikan diatas tidak akan muncul dipermukaan sehingga tidak mengherankan bahwa transformasi *class in itsel* menjadi *class for itsel* akan terhambat dan tidak akan terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil studi menunjukkan struktur kelas nelayan di Ambon terdiri dari kelas buruh nelayan terbagi dua yaitu buruh masnait dan buruh tanase, kelas nelayan kecil, kelas nelayan menengah, dan kelas nelayan besar. Proses pembentukan kelas melalui penguasaan alat produksi, proses penguasaan alat produksi ada dua yaitu modernisasi alat tangkap dan akumulasi kapal perikanan tangkap. Ketimpangan yang terjadi antar nelayan di Ambon tergolong tinggi, dilihat dari indeks gini dan ukuran Bank Dunia, indeks gini menunjukkan nilai sebesar 0,74 sedangkan pada ukuran Bank Dunia, lebih dari 40% nelayan menunjukkan presentase pendapatan yang diterima oleh kelas nelayan kecil maupun buruh masnait lebih kecil dari 12%. Kondisi ini menggambarkan bahwa telah terjadi ketimpangan antar kelas nelayan, dimana sebanyak 75% hanya mampu menerima 8,27% dari total pendapatan sedangkan sebanyak 25% nelayan pemilik (kapitalis) menikmati dan menguasai 91,73% dari total pendapatan. Potret kondisi nelayan kecil yang melakukan aktifitas perikanan tangkap di Kota Ambon menunjukkan ketertinggalan dari segi alat produksi, sehingga berapapun usaha yang dikerjakan oleh mereka tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh oleh kelas nelayan kecil.

Visi Indonesia negara maritim seharusnya menjadi tolak ukur dasar untuk mengembalikan cita-cita bangsa yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat nelayan kecil sebagai bagian dalam struktur masyarakat di Indonesia dapat merasakan kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya tanpa adanya jurang antara kelompok kaya dan miskin. Sekiranya perlu untuk membentuk kelompok nelayan kecil atau organisasi nelayan kecil untuk memperjuangkan hak-hak nelayan kecil agar keluar dari jurang ketimpangan. Perlunya penelitian serupa pada lokasi lain agar dapat mengetahui ragam kelas nelayan dan ketimpangan struktural antar kelas nelayan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, I. 2014. Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis, dan Pragmatis Sejak Pra Kolonial. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

BPS Kota Ambon. 2017. Badan Pusat Statistik Penduduk Ambon : Ambon Februari 2016.

Creswell JW. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Collins, Randall. 1975. *Conflict Sociology : Toward an explanatory Science*. New York : Academic Press.

Dahuri, R., Nugroho, I., 2012. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Jakarta. LP3ES

DKP Kota Ambon. 2017. Statistik Perikanan Tangkap Kota Ambon, 2016.

Haughton, J., Khandker, S.R. 2013. Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan: Handbook on Poverty And Inequality. Jakarta: Salemba Empat.

Helmi A, Satria A. 2012. Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis [Jurnal]. Jurnal Makara, Sosial Humaniora. 16 (1): 68-78 [Internet]. [29/03/2016]. Tersedia pada: <http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/viewFile/1494/38>

Imron M. 2003. Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan [Jurnal]. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 5(1):63-82[Internet]. [diunduh 08 Januari 2017]. Tersedia pada: <http://jmb.lipi.or.id/index.php/jmb/article/viewFile/259/237>

Kinseng. R. 2014. Konflik Nelayan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kinseng. R. 2013. Kelas, Pendapatan, dan Kesadaran Kelas. Laporan akhir penelitian unggulan perguruan tinggi. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.

Kinseng. R. 2017. Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 127-137.

Kohn, Melvin L. 1990. "Position in the class structure and Psychological Functioning in the United States, Japan, and Poland". American Journal of Sociology, Vol. 95, No. 4, January 1990.

Kusnadi. 2002. Nelayan; Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. Humaniora Utama Press. Bandung.

Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. LKIS. Yogyakarta.

Maipita, I. 2014. Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Pemerintah Negeri Latuhalat. 2016. Profil dan Monografi Negeri Latuhalat.

Retna M. I, Sumarti T, Satria A. 2018. Tindakan Rasional dan Strategi Berjejaring Rumah Tangga Nelayan Kecil. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 1 April, hal 32-39

Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rohayati. 2017. Pengaruh Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang dan Modal Sosial Terhadap Kemiskinan Nelayan di Kota Tegal. Thesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Satria A. 2009. Ekologi Politik Nelayan. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.

Stavenhagenm Rudolfo. 1975. *Social Classes in Agrarian Societies* (trans. By Judy Alder Hellman). New York. Anchor Press/ Doubleday, Garden City.

Sudarso. 2007. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik: Tekanan Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Tradisional di Perkotaan. Journal Universitas Airlangga, Vol. 20/ No.2 page 87-102. Published: April 2007.

Sukmawati. 2008. Struktur dan Pola Hubungan Sosial Ekonomi Juragan dengan Buruh di Kalangan Nelayan Pantai Utara Jawa Barat: Studi Tentang Simbiosis Antara Juragan dengan Nelayan Buruh di Pondok Bali Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang. Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol. 10, No.1, Januari 2008: 50-63.

Sumarti T. 2007. Sosiologi Kepentingan (*Interest*) dalam Tindakan Ekonomi [Jurnal]. Sodality. (1): 283-293 [Internet]. [23/07/2017]. Tersedia pada: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5925>

Todaro, M., Stephen Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga.

Turner, Jonathan H. 1998. The Structure of Sociological Theory (Fifth Ed). California: Wadsworth Publishing Company, Belmont

Wright, Erik Olin. 1987. Classes. Verso, London-NewYork.

Wright, Erik Olin. 1991. " The Conceptual Status of Class Structure in Class Analysis" dalam Scot G. McNall, Rhonda F. Levine and Rick Fantasia (editors). *Bringing Class Back In. Contemporary and Historical Perspectives*. Westview Press.